

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945, di Sumatera Barat ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam dunia sosial dan pendidikan yang dilakukan oleh kaum perempuan seperti, organisasi Bundo Kanduang, Serikat Kaum Ibu Sumatera, Perguruan Diniyah Putri, Organisasi Kerajinan Amai Setia, dan Organisasi Aisyiyah. Salah satu organisasi yang tetap eksis adalah Organisasi Aisyiyah, yaitu suatu organisasi yang pertama kali didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1917. Kemudian organisasi Aisyiyah tersebut masuk dan berkembang di Minangkabau seiring dengan masuk dan berkembangnya Muhammadiyah di Minangkabau yang didirikan oleh Haji Rosul (Haji Abdul Karim Amrullah).¹

Seiring dengan berdirinya Muhammadiyah di Minangkabau, tepatnya di Sungai Batang pada tahun 1925, setahun kemudian cabang Aisyiyah yang pertama berdiri pula di Sungai Batang tahun 1926. Anggota pertama dari organisasi tersebut adalah Dariah (istri dari Haji Abdul Karim Amrullah) dan adiknya Hafsah. Kemudian sekembalinya Fatimah Abdul Karim Amrullah (istri A.R Sutan Mansoer) dari Pekalongan tahun 1927, Aisyiyah cabang Sungai Batang Maninjau mulai berkembang. Pada tahun 1927 tersebut

¹Taufik Abdullah, *Sekolah Dan Politik: Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat 1927-1933. Terjemahan Lindayanti dan A. Guntur*, (Padang: Fsua, 1988), hlm. 102.

Aisyiyah cabang Sungai Batang mulai berdiri sendiri, dengan arti kata tidak lagi menjadi cabang dari Aisyiyah Yogyakarta.²

Sesuai dengan namanya, maka organisasi Aisyiyah menggambarkan kiprah perempuan khususnya di Minangkabau, Sumatera Barat. Ada beberapa kegiatan dari Organisasi Aisyiyah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga aksi-aksi perempuan di Sumatera Barat. Eksistensi organisasi yang tetap bertahan dalam gelombang perjalanan sejarah yang dilalui Aisyiyah menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, karena terkait juga dengan aspek lokal daerah Sumatera Barat yang menyambut baik organisasi ini. Bagaimana organisasi ini bertahan, dan menjawab tantangan zaman tentu menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Bermula di bawah kepemimpinan presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno, yang secara umum disebut dengan masa Orde Lama. Rakyat Indonesia menyaksikan beberapa peristiwa dalam perubahan politik yang besar lagi krisis di Indonesia. Di antara yang paling penting adalah: *Pertama*, pada saat demokrasi terpimpin, dimana saat itu presiden Soekarno menyadari bahwa demokrasi liberal selama ini telah merangsang munculnya banyak pembontakan yang membahayakan kesatuan negara Indonesia tercinta. Kemudian Soekarno mengumumkan pada awal 1957 sebagai Demokrasi Terpimpin dengan kembalinya kepada UUD 1945. Masa demokrasi terpimpin ini dicirikan dengan kontrol politik yang ketat dari presiden melalui doktrin Nasakomnya (nasionalisme, agama dan komunis).

²Taufik Abdullah, *Ibid.* hlm. 102.

Hubungan dekat antara Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menghantui doktrin Nasakom, umumnya dilihat sebagai suatu usaha untuk membawa PKI berkuasa di panggung politik Indonesia.³

Kedua, ketika terjadi pergolakan Komunis di Indonesia, kudeta Komunis yang terkenal pada 30 September 1965 (G30SPKI) yang mengakhiri zaman Demokrasi Terpimpin bahkan seluruh Orde Lama. Dalam peristiwa berdarah tersebut PKI dituduh sebagai dalang sehingga berakibat tewasnya enam jenderal Angkatan Darat (AD) Indonesia. Peristiwa ini jugalah yang mengangkat Soeharto sebagai ke panggung politik Indonesia, dalam rangka menjaga Soekarno dan mengambil alih kendali angkatan bersenjata. Kemudian akhir dari Orde Lama tersebut juga mengakhiri Komunis di Indonesia.⁴

Setidaknya di bawah naungan Soekarno pada masa Orde Lama terdapat dua kecenderungan. *Pertama*, Indonesia sebagai sebuah negara yang baru berdiri, tentu Indonesia berada dalam proses pencarian identitasnya, dan mencari model terbaik untuk menyatukan masyarakatnya yang sangat beragam. *Kedua*, perhatian yang sangat besar diarahkan oleh pemerintah kepada usaha-usaha membangun negara yang masih baru berdiri, sebuah proses yang di dalamnya setiap elemen diundang untuk memberikan sumbangsih mereka.⁵

³ Rofa'ah, *Posisi dan Jati Diri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 64.

⁴ Rofa'ah. *Ibid*, hlm. 64.

⁵Rofa'ah. *Op.Cit*, hlm. 65.

Keadaan politik yang dihasilkan Indonesia sangat mempengaruhi revolusi pergerakan perempuan di Indonesia khususnya Sumatera Barat. Diman pada masa pendudukan Jepang sempat mengalami *kejumudan*. Namun ketika terjadi beberapa peristiwa penting pada masa Orde Baru yang mengharuskan berakhirnya Orde Lama tersebut dan negara Indonesia masih mencari identitasnya, kemudian ada usaha dari pemerintah untuk membangun negara Indonesia yang baru merdeka, tentu jelas Indonesia masih tergolong negara miskin. Dalam keadaan yang demikian, organisasi Aisyiyah ikut terlibat dengan program-program pembangunan sosialnya, dimana Organisasi Aisyiyah menempatkan aktivitas-aktivitas sosial sebagai yang terdepan dalam agendanya, menimpali kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan ekonomi.⁶

Bagi Aisyiyah pembangunan sosial mengambil wujud pendirian infrastruktur, khususnya dalam ranah pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas-aktivitas amal. Pada tahun 1963, misalnya Aisyiyah berhasil mendirikan banyak Badan Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Panti Asuhan, dan Rumah Putri. Di bagian pembangunan Lembaga Pendidikan, prestasi utama organisasi Aisyiyah adalah pendirian sejumlah sekolah seperti, sekolah Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal (TK ABA) dan Perguruan Tinggi.⁷

Pasca PRRI pada tahun 1974 Organisasi Aisyiyah melaksanakan Mukhtar ke-39 di Padang, saat itu Baroroh Baried sebagai Pimpinan Pusat

⁶ Rofa'ah. *Ibid*, Hlm. 68.

⁷ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*, (Pimpinan Pusat Aisyiyah Seksie Khusus Penerbitan dan Publikasi, 1992), hlm. 38.

Aisyiyah⁸ dan Aminah Makarim (1972-1978) sebagai ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat.⁹

Putusan Mukhtamar ke-39 tersebut diantaranya, perhatian Aisyiyah ditujukan kepada perempuan di pedesaan. Salah satu keputusan Mukhtamar di Padang tersebut menyebutkan, supaya Aisyiyah mengadakan peninjauan untuk mendapatkan macam-macam usaha yang mungkin dapat dilakukan oleh Aisyiyah dalam ikut membantu menangani Pembinaan Perempuan Desa.¹⁰

Kemudian keputusan lainnya ialah memutuskan nama Bagian Pendidikan Bidan diubah menjadi Bagian Pendidikan Paramedis. Di samping itu, juga diputuskan Badan Pembantu Pimpinan (BPP) menambah Bagian Ekonomi dan menjangkahi Pembinaan Perempuan Desa yang bertujuan agar perempuan desa memiliki kesadaran untuk melaksanakan Rukun Islam, sadar terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan masyarakat, serta memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan penghasilan.¹¹

Secara tertulis di Sumatera Barat memang tidak disebutkan target desa yang dibina, namun secara aktivitas juga terlihat melaksanakan suatu gerakan dalam mencerdaskan serta memajukan kaum perempuan di Sumatera Barat dengan mendirikan berbagai macam gerakan amal usaha di Kabupaten dan Kota. Dalam hal ini akan dilihat beberapa kabupaten saja sebagai sampel dalam melakukan gerakan pamajuan kaum perempuan berdasarkan

⁸Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah*, (Yogyakarta; Pimpinan Pusat Aisyiyah, 2012), hlm. 69.

⁹Rb. Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat) dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 239.

¹⁰Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*, (Pimpinan Pusat Aisyiyah Seksie Khusus Penerbitan dan Publikasi, 1992), hlm. 78.

¹¹RB. Khatib Pahlawan Kayo. *Ibid*, hlm. 45.

Kabupaten/Kota yang paling banyak mendirikan amal usaha dalam berbagai bidang seperti, bidang pendidikan yaitu Kota Padang (32 TK, 21 KB, 1 SD, dan 1 SLTP), bidang kesehatan yaitu Kota Padang dan Pariaman, dan bidang kesejahteraan sosial akan diambil Kabupaten Agam (7 Panti), dan bidang usaha dipilih Kabupaten Dharmasraya (14 BUEKA).¹²

Kemudian dengan berjalan dan makin eksisnya kegiatan organisasi Aisyiyah disebabkan oleh banyak faktor, misalnya organisasi Aisyiyah mendapatkan sokongan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Sokongan dari masyarakat seperti adanya kegiatan pengajian rutin sekali dalam tiga bulan yang digilirkan ke daerah-daerah di Sumatera Barat yang dihadiri oleh masyarakat umum. Kemudian ada pula masyarakat yang dengan suka rela mewakafkan tanah maupun hartanya untuk pendirian amal usaha Aisyiyah seperti asrama panti dan sekolah.¹³

Sedangkan sokongan dari pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, pada waktu itu pergerakan perempuan menerima dukungan yang lebih besar dari pemerintah. Sementara diwaktu yang bersamaan, sebagaimana yang terjadi dengan organisasi massa lainnya, pergerakan perempuan menjadi subjek kontrol pemerintahan yang lebih ketat atau “pengawasan dekat”. Dan Organisasi Aisyiyah juga mendapatkan dukungan besar dari pemerintah pada masa Orde Baru tersebut.¹⁴

¹² PWA Sumbar, “Data Amal Usaha Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat”.

¹³ Wawancara dengan Rahman (Staf Tata Usaha Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat) tanggal 11 Juni 2022.

¹⁴ Rofa’ah, *Posisi dan Jati Diri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 91.

Penyebab lain kenapa masyarakat Sumatera Barat menyambut baik keberadaan organisasi Aisyiyah adalah dapat dilihat dari aspek kelokalan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal (garis keturunan ibu), dimana sistem Matrilineal ini menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan di Minangkabau. Sehingga keberadaan Organisasi Aisyiyah sejalan dengan sistem Matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, karena sama-sama memajukan dan memuliakan kaum perempuan, sehingga organisasi Aisyiyah berkembang dengan cepat di Sumatera Barat.

Berdasarkan arsip Surat Keputusan Pimpinan Daerah Aisyiyah se Sumatera Barat (SK PDA) tahun 2016, cabang dan ranting organisasi Aisyiyah sudah tersebar di 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Panjang Batipuh Sepuluh Koto, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, dan Kota Pariaman.¹⁵

Perkembangan serta kemajuan yang terjadi pada organisasi Aisyiyah saat ini tidak terlepas dari usaha-usaha dan terobosan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Aisyiyah pada setiap kepengurusan Aisyiyah diseluruh Sumatera Barat. Dalam Musywil ke-41 Aisyiyah Sumatera Barat yang diadakan di Asrama Haji Embarkasi Padang pada tahun 2016, Meliarni Rusli terpilih

¹⁵Pimpinan Wilayah Aisyiyah, "Data Pimpinan Daerah Aisyiyah se Sumatera Barat tahun 2022". (Padang: *Arsip* Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat, 2016).

sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat periode 2015-2020, dalam Musywil tersebut Meliarni Rusli menyampaikan kemajuan Organisasi Aisyiyah yaitu, Aisyiyah Sumatera Barat sudah memiliki anggota sekitar 6.330 orang yang terdiri dari 18 Cabang Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA), 131 Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA), 719 Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.¹⁶

Bidang Keagamaan, organisasi Aisyiyah memiliki 1 Masjid, 4 Mushalla, dan 285 Tempat Pengajian serta 60 Muballighat. Bidang Pendidikan, Aisyiyah memiliki 247 TK Bustanul Athfal (TK ABA), 106 Kelompok Bermain (KB), 75 Taman Pengasuhan Anak, 1 Perguruan Tinggi, 1 Sekolah Dasar (SD) dan 30 Madrasah Diniyah Awaliyah Tsanawiyah serta 1 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sijunjung. Bidang Kesejahteraan Sosial Aisyiyah memiliki 27 Panti Asuhan dengan memperdayakan masing-masing cabang dan ranting. Bidang Usaha/Ekonomi, organisasi ini sudah memiliki 95 orang pengusaha dan 60 Badan Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA) serta 1 BMT. Dan dalam Bidang Kesehatan, Aisyiyah Sumatera Barat memiliki dua 2 Rumah Sakit, dan 8 Klinik Pratama Aisyiyah. Walaupun kendati banyak kemajuan Organisasi Aisyiyah Sumatera Barat, fokus dalam tulisan hanya akan dilihat dalam beberapa bidang saja diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan sosial dan bidang ekonomi atau usaha.¹⁷

¹⁶ “Muswil ke-41 Aisyiyah Sumbar: Revitalisasi Gerakkan Perempuan Muslim Sumbar yang Berkemajuan”.

¹⁷ “Muswil ke-41 Aisyiyah Sumbar: Revitalisasi Gerakkan Perempuan Muslim Sumbar yang Berkemajuan”.

Berdasarkan uraian di atas, terjadi perkembangan Aisyiyah yang pesat di Sumatera Barat dan memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan kaum perempuan di Sumatera Barat serta sejalan dengan aspek kelokalan Minangkabau, sehingga organisasi Aisyiyah jelas menarik untuk dikaji. Atas dasar konteks ilmiah, tulisan ini diberi judul *“Organisasi Aisyiyah dan Gerakan Perempuan di Sumatera Barat, 1968-2016”*.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dinamika Organisasi Aisyiyah awal masuk dan berdirinya di Minangkabau ?
2. Bagaimanakah perkembangan Organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat dari tahun 1968-2016 ?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk gerakan Organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat ?

Kemudian untuk batasan masalah, penelitian ini dibatasi oleh dua skop yaitu, tahap spasial dan tahap temporal. Batasan spasial yang dipilih adalah wilayah Sumatera Barat karena dalam bentuk struktur kepemimpinan wilayah Muhammadiyah sekaligus Aisyiyah Provinsi Sumatera Barat adalah Pimpinan Wilayah, sehingga penelitian ini mencakup pada 18 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat secara umum. Akan tetapi lebih difokuskan pada daerah yang banyak terdapat kemajuan dalam bidang pendidikan yaitu di daerah Kota Padang, bidang kesehatan yaitu daerah Kota

Padang dan Pariaman, bidang kesejahteraan sosial yaitu daerah kabupaten agam dan bidang ekonomi atau usaha yaitu daerah Dharmasraya.

Sementara batasan temporal yang dipilih adalah tahun 1968-2016, alasan diambil batasan awalnya tahun 1968 karena Organisasi Aisyiyah pasca PRRI bisa dikatakan mulai dari nol lagi dalam memajukan kaum perempuan di Sumatera Barat yang disebabkan Organisasi Aisyiyah dekat dengan orang-orang PRRI. Sedangkan tahun 2016 sebagai batas akhir dipilih dikarenakan terjadi kemajuan yang sangat pesat bagi organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat, setidaknya ditahun 2016 tersebut cabang dan ranting Aisyiyah sudah tersebar di 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, jumlahnya naik secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun pertama berdirinya Aisyiyah di Sumatera Barat yang hanya terdapat di beberapa daerah di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dinamika Organisasi Aisyiyah awal masuk dan berdirinya di Minangkabau.
2. Menjelaskan atau menguraikan perkembangan Organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat dari tahun 1968-2016.
3. Menjelaskan bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan oleh Organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat.

1.4 Mafaat Penelitian

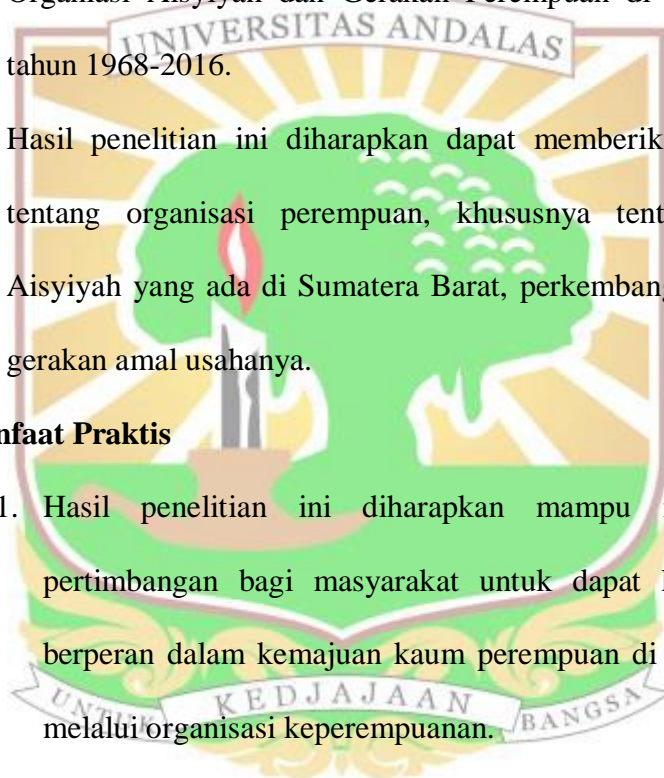
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas serta tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap khasanah keilmuan dalam Ilmu Sejarah mengenai Organisasi Aisyiyah dan Gerakan Perempuan di Sumatera Barat tahun 1968-2016.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang organisasi perempuan, khususnya tentang Organisasi Aisyiyah yang ada di Sumatera Barat, perkembangan amal usaha, gerakan amal usahanya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk dapat lebih aktif ikut berperan dalam kemajuan kaum perempuan di Sumatera Barat melalui organisasi keperempuanan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan maupun pembuka inspirasi bagi penelitian selanjutnya, terutama sekali yang fokus kajiannya tentang organisasi dan gerakan perempuan.



1.5 Tinjauan Pustaka

Referensi dalam sebuah penelitian sangat penting, sebelum melakukan penelitian diperlukan adanya referensi terdahulu. Untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan diantaranya, tulisan Mardanas Safwan dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, tulisan ini menguraikan tentang usaha yang dilakukan Aisyiyah untuk memajukan pendidikan yaitu dengan mendirikan sekolah.¹⁸ Selanjutnya tulisan Ishaq Taher dengan judul *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*, tulisan ini membahas tentang Muhammadiyah dikaitkan dengan kebangkitan Nasional di daerah Sumatera Barat, seterusnya diuraikan juga tentang usaha Aisyiyah dan Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi sosial yang disebut Penolong Kesusahan Umum.¹⁹

Buku tulisan Pimpinan Pusat Aisyiyah dengan judul *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*. Dalam buku tersebut memang secara keseluruhan lebih banyak menjelaskan tentang Aisyiyah yang berada dipusat yaitu Aisyiyah Yogyakarta, namun juga menyinggung tentang Aisyiyah yang ada di Sumatera Barat.²⁰

¹⁸ Mardanas Safwan, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, (Jakarta: Depdikbud, 1981).

¹⁹ Ishaq Taher, *Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*, (Jakarta: Depdikbud, 1988).

²⁰ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*, (Yogyakarta: PP Aisyiyah, 1992).

Buku yang ditulis oleh Rofa'ah dengan judul *Posisi dan Jati Diri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan*,²¹ buku ini menguraikan tentang berdirinya Aisyiyah, kemudian dilanjutkan dengan Aisyiyah di masa Pra dan Pasca Kemerdekaan dan organisasi Aisyiyah masa Orde Baru. Tulisan ini dapat membantu untuk perbandingan Aisyiyah pusat dan Aisyiyah yang ada di Sumatera Barat, terlebih lagi masa orde baru yang dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk melihat organisasi Aisyiyah lebih mendalam.

Selanjutnya buku Taufik Abdullah dengan judul *Sekolah dan Politik; Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat (1927-1933)*, menguraikan tentang berdirinya Aisyiyah di Sumatera Barat dan reaksi masyarakat atas kehadiran Aisyiyah, kemudian juga membahas masalah yang terjadi sewaktu diadakan kongres Muhammadiyah ke-19 tahun 1930 di Bukittinggi.²²

Tulisan Hamka dengan judul *Islam dan Adat Minangkabau* yang menguraikan tentang hubungan Muhammadiyah dan Aisyiyah dengan adat Minangkabau. Muhammadiyah di Minangkabau tulisan Hamka, memaparkan sejarah Muhammadiyah dan Aisyiyah di Sumatera Barat semenjak berdiri tahun 1920-1970.²³ Karya Hamka lainnya dengan judul *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, buku ini menerangkan tentang anggota dan ketua Aisyiyah yang

²¹Rofa'ah, *Posisi dan Jati Diri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016).

²² Taufik Abdullah, *Sekolah dan Politik: Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat 1927-1933, Terjemahan Lindayanti dan A. Guntur*, (Padang: FSUA, 1988).

²³ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1985).

pertama di Sungai Batang, serta pandangan H. Abdul Karim Amrullah terhadap kaum perempuan dan organisasi Aisyiyah pada awal berdirinya.²⁴

Jurnal yang ditulis oleh Khairanis dengan judul “Dari Yogyakarta ke Kenagarian Kubang; Organisasi Aisyiyah Cabang Kubang (1930-1945)”. Dalam tulisan ini dijelaskan sekilas perkembangan organisasi Aisyiyah yang ada di Sumatera Barat namun lebih ditekankan secara mendalam tentang perkembangan Aisyiyah yang ada di Kubang dan peran pemerintah dalam organisasi Aisyiyah di Kubang. Tulisan ini juga membantu dalam melihat perkembangan Aisyiyah di Kubang sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding untuk periode kontemporer.²⁵

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Dedi Asmara dengan judul “Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat (1925-1950)”. Dalam tulisan tersebut secara umum menjelaskan Muhammadiyah di Sumatera Barat dari awal mula berdirinya sampai dengan masa kemerdekaan, namun karena Aisyiyah berada di bawah naungan Muhammadiyah sehingga juga disinggung dalam pembahasannya tentang Aisyiyah di Sumatera Barat.²⁶

Terakhir, skripsi Asrul Juita dengan judul “Aisyiyah di Sumatera Barat (1926-1942)”. Tulisan ini menjadi pintu masuk untuk melihat lebih jauh tentang perkembangan Aisyiyah sebelum Indonesia merdeka, karena dalam

²⁴ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, (Jakarta: Umminda, 1983).

²⁵Khairanis, “Dari Yogyakarta ke Kenagarian Kubang: Organisasi Aisyiyah Cabang Kubang (1930-1945)”, *Jurnal* (Padang: Labor Sejarah Unand, Analisis Sejarah, Vol.9 No. 2, 2020).

²⁶Dedi Asmara, “Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat (1925-1950)”, *Jurnal*, (Padang; Labor Sejarah Unand dalam Analisis Sejarah, Volume 5, No. 1, 2016).

tulisan ini hanya dibatasi sampai tahun 1942 dan membahas tentang kaum perempuan sebelum organisasi Aisyiyah didirikan, reaksi masyarakat ketika Aisyiyah pertama didirikan di Sumatera Barat dan perkembangan Aisyiyah sampai dengan penjajah hengkang dari Indonesia, sedangkan dalam tulisan ini lebih ke masa setelah kemerdekaan Indonesia sampai tahun 2016, maka secara tidak langsung penulis melihat kelanjutan perkembangan Aisyiyah di Sumatera Barat setelah tahun 1945.²⁷

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang perkembangan dan gerakan organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat masih terbuka untuk dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih komprehensif, karena belum ada yang menulis secara mendalam tentang kajian perkembangan dan gerakan organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat pasca PRRI yaitu pada masa kontemporer. Apalagi penelitian ini lebih difokuskan pada perkembangan dan bentuk-bentuk gerakan Organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat pada mas Kontemporer atau Pasca PRRI.

1.6 Kerangka Analisis

Langkah yang sangat penting dalam membuat suatu analisis sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka analisis yang menyangkut konsep teori yang akan dipakai dalam membuat analisis tersebut.²⁸

²⁷Asrul Juita, "Aisyiyah di Sumatera Barat (1926-1942)", *Skripsi*, (Padang: Fakultas Sastra Unand, 1991).

²⁸Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 2.

Menurut Peter Burke perempuan nyaris tidak tampak oleh sejarawan, dalam arti bahwa pentingnya pekerjaan mereka sehari-hari, pengaruh politik mereka (pada semua tingkatan politik), pada umumnya terabaikan.²⁹ Gerakan perempuan dan teori-teori yang terkait dengan itu telah mendorong baik sejarawan perempuan maupun laki-laki untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru tentang masa lalu, sehingga gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan dapat diungkapkan di depan publik.

Peran kaum perempuan yang diungkapkan dalam tulisan ini ialah peran Organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat, maka dapat menggunakan teori Marvin E. Olsen terkait organisasi sosial yang merupakan sebuah proses yang berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia, dimana diantara manusia tersebut akan berinteraksi dengan banyak individu lain setiap harinya. Setiap individu yang melakukan interaksi setiap harinya dan menjadi sebuah hubungan yang berkelanjutan, maka proses itulah nantinya akan melahirkan jutaan keluarga, kelompok, komunitas, asosiasi, dan organisasi sosial. Hal ini membuktikan bahwa organisasi sosial sebuah proses yang dinamis, sebagian dari proses itu akan menyebabkan kehidupan sosial menjadi teratur dan bermakna, meskipun tidak pernah statis. Artinya organisasi sosial prosesnya akan membawa ketertiban dan bermakna dalam kehidupan sosial manusia.³⁰ Organisasi Sosial yang akan dilihat dalam penelitian ini sesuai dengan teori Marvin E. Olsen adalah Organisasi Aisyiyah yang melakukan interaksi dari Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting sehingga dapat

²⁹Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2000), hlm. 55.

³⁰Marvin E. Olsen, *The Proses Of Social Organization*, (Amerika: Oxford & IBH Publishing CO,1975), hlm. 2.

mendirikan berbagai amal usaha atau menambah dan turut memajukan kaum perempuan di Sumatera Barat.

Proses organisasi sosial setidaknya harus melibatkan dua orang yang saling berinteraksi melalui keinginan dan komunikasi, ketika tatanan sosial muncul dari hubungan sosial yang berulang, maka mereka akan menciptakan sebuah gagasan budaya bersama. Sehingga organisasi sosial secara umum adalah proses penggabungan aktor-aktor sosial menjadi hubungan-hubungan yang teratur, kemudian diresapi dengan gagasan-gagasan budaya.³¹

Penelitian ini juga akan difokuskan pada sejarah serta perkembangan organisasi institusi atau lembaga yang terkait langsung dengan partisipasi sosial perempuan di Minangkabau secara terorganisasi. Menurut Koentjaraningrat, lembaga sosial merupakan suatu kesatuan dari kelakuan berpola, sistem norma, pendukung lembaga tersebut yang lebih menekankan pada idealisme, nilai dan norma.³² Membentuk suatu keutuhan tatanan perilaku manusia untuk hidup bersama dalam masyarakat merupakan tujuan dari kelembagaan sosial. Pendapat lain, lembaga sosial ialah kumpulan dari berbagai tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok dalam hidup bermasyarakat.³³

³¹Marvin E. Olsen. *Ibid*, The Proses Of Social Organization, hlm. 3.

³²Koentjaraningrat, *Ensiklopedia Nasional Indonesia* Jilid 7, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 334.

³³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Rajawali Pres, 1987), hlm. 178.

Kemudian teori yang juga dipakai dalam penelitian ini ialah teori *Women In Development*,³⁴ teori ini digunakan untuk melihat keikutsertaan perempuan kepada efisiensi dan anti kemiskinan perempuan di pedesaan pada tahun 1960 sampai tahun 1970-an di Sumatera Barat. Agenda utama program WID adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan, asumsinya, penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dimana pada masa tersebut pemerintah mengintegrasikan atau menyertakan perempuan dalam pembangunan dan menjadikannya sebagai agenda untuk pembangunan perempuan, khususnya pembangunan di Sumatera Barat.

Lebih lanjut tahun 1970-an sampai tahun 1980-an dapat pula menggunakan teori *Women and Development* untuk melihat proses pencukupan ekonomi sendiri dan membuat organisasi sendiri, serta menolak menggabungkan perempuan dan laki-laki dalam struktur ekonomi sebagai suatu tujuan, serta menyokong penggabungan budaya yang homogen untuk mempromosikan kesamaan ekonomi pada tahun tersebut.³⁵

Tahun 1980-an sampai tahun 2000-an, penelitian ini dapat menggunakan teori *Gender and Development*. Dimana pada periode ini melahirkan simbol ketidaksamaan dalam hubungan sosial antara laki-laki dan

³⁴Happy Budi Febriasih, Chalid Maulina, M. Miftah Wahyudi, dkk, *Gender dan Demokrasi*, (Malang: Program Sekolah Demokrasi PLaCID's, 2008), hlm. 33-34.

³⁵A. Nunuk P.Murniati, *Getar dan Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang; Indonesia Tera, 2004), hlm. 25.

perempuan. Dalam pembangunan berusaha untuk menggabungkan konstruksi sosial gender ke dalam pembangunan.³⁶

Selanjutnya untuk melihat gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Organisasi Aisyiyah dapat menggunakan beberapa teori diantaranya. Gerakan sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada.³⁷

Antony Giddens menyatakan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga yang mapan.³⁸

Gerakan sosial terdiri berbagai macam jenis gerakan, salah satunya adalah gerakan perempuan yaitunya gerakan di arena sosial, gerakan perempuan berkembang menolak bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan. Jika dilihat dari sifat perjuangannya, gerakan perempuan ini muncul sebagai salah satu bentuk kesadaran untuk mengejar ketertinggalan

³⁶Beda diantara ketiga teori di atas ialah; pertama Teori *Women In Development* (WID) muncul ketika disadari perempuan masuk menjadi tenaga kerja di sektor publik (termasuk sebagai kehidupan buruh), mempersoalkan perempuan yang selalu kalah dalam persaingan dengan kaum laki-laki dalam dunia kerja, dan menyelesaikan masalah dengan meningkatkan pendidikan kaum perempuan agar mampu bersaing dalam pembangunan. Dan teori *Women And Development* (WAD) muncul ketika disadari tenaga produksi perempuan tergeser dari peran publik menjadi peran domestik dan tidak dihargai, mempersoalkan tenaga produksi perempuan disektor publik dan domestik akibat dari pelebagaan pemilikan pribadi dunia inferior, dan menyelesaikan masalah dengan meningkatkan perempuan dalam pembangunan. Serta teori *Gender And Development* (WAD) muncul ketika disadari perempuan secara sistematis diberi peran inferior dalam masyarakat, mempersoalkan relasi perempuan dan laki-laki yang timpang akibat budaya patriaki, dan menyelesaikan dengan mengubah paradigma dari wawasan patriaki ke wawasan gender sehingga perempuan mempunyai akses dan kontrol dibidang politik. *Ibid*, hlm. 26.

³⁷Rajendra Singh, *Social Movement, Old and New: A Post Modernist Critique* (London: Sage Publication, 2001), hmn. 34.

³⁸Fadhillah Putra dkk, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, (Malang; PlaCID's dan Averroes Press, 2006), hlm. 1.

dan melawan ketidakadilan yang diterima oleh perempuan terkait dengan konstruksi sosial terhadap jenis kelamin sebagai perempuan.³⁹

Gerakan perempuan yang dimaksud disini adalah dalam bentuk perjuangan perempuan secara organisasi perempuan. Secara organisasi gerakan yang dilakukan oleh Aisyiyah memajukan berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan ekonomi. Semua itu diwujudkan untuk menunjukkan bahwa perempuan dalam berorganisasi sejajar dengan organisasi yang ada yang dijalankan oleh laki-laki. Secara identitas pengelolaan Aisyiyah dilakukan semua oleh kaum perempuan.

Aisyiyah merupakan organisasi otonom Muhammadiyah istilah yang mengacu pada pengertian jenis atau varian keislaman yang memiliki karakteristik toleran, pluralis, liberal, demokratis, inklusif, humanis, pro-perubahan sosial, berprinsip pada kesetaraan gender, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Peran yang sangat peduli untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, yakni berupa pengajaran dan pendidikan etika, moral dan agama bagi masyarakat. Bahkan, ketika Aisyiyah berusaha fokus mengurus sekolah dan rumah sakit. Aisyiyah selalu membangun sinergitas dengan pemerintah, oleh karena itu berbagai aktifitas yang dilakukan untuk penguatan program-program yang sejalan dengan tugas negara.

Aisyiyah menegaskan bahwa corak gerakannya yaitu membawa kesadaran beragama dan berorganisasi serta mengajak warganya untuk

³⁹Situmorang, Abdul Wahid, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 62.

menciptakan *Baladun Thaiyyibatun wa Rabbun Ghafur*. Suatu kehidupan bahagia dan sejahtera penuh limpahan rahmat Allah SWT di dunia dan di akhirat.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu mencari, menemukan dan menguji sumber-sumber yang didapatkan, sehingga menjadi sebuah fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya.

Menurut Gilbert J. Garraghan dalam bukunya *A Guide to Historical Method* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah seperangkat azas atau kaidah-kaidah yang sistematis yang diubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.⁴⁰

Sedangkan Louis Gottschalk, dalam bukunya *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau⁴¹, dimulai dari pengumpulan data hingga sampai ke penulisan. Metode sejarah mempunyai empat tahapan pelaksanaan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi atau sintesis dan historiografi atau penulisan.⁴²

⁴⁰Gilbert J. Graghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1998), hlm. 54-57.

⁴¹ Louis GottSchalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32.

⁴²Nina Herlina, *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020*, (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 115-123.

Penelitian ini dilakukan secara bertahap agar penelitian ini menghasilkan rekonstruksi sejarah yang utuh. Pada tahap *pertama* yaitu Heuristik: tahap mencari, menemukan, mengumpulkan sumber-sumber dalam berbagai bentuk untuk dapat mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data-data terkait organisasi Aisyiyah dan gerakannya di Sumatera Barat, baik sumber tertulis seperti arsip-arsip yang ada di kantor Pimpinan Wilayah Aisyiyah, arsip-arsip yang ada di Pimpinan Cabang Aisyiyah tingkat Kabupaten/Kota, dan arsip-arsip yang berada di Pimpinan Ranting Aisyiyah se Sumatera Barat, diantaranya;1) *Arsip* Daftar Panti Asuhan Aisyiyah se-Indonesia ;2) *Arsip* Laporan Dinamika Gerakan Aisyiyah Pimpinan Wilayah Sumatera Barat periode 2010-2015 dalam Mukhtamar Aisyiyah ke-47 ;3) *Arsip* kegiatan Majelis Tabligh PWA Sumbar tahun 2011-2012 ;4) *Arsip* laporan kegiatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah periode 2015-2020 ;5) *Arsip* Data Organisasi Aisyiyah Tingkat Wilayah tahun 2000-2005 ;6) *Arsip* Laporan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat dalam Mukhtamar Aisyiyah ke-46 di Jogjakarta tahun 2005-2010 ;7) *Arsip* laporan kegiatan Majelis Dikdasmen PWA Sumbar tahun 2005-2010 ;8) *Arsip* data Daerah, Cabang dan Ranting Aisyiyah Se-Sumatera Barat tahun 2010-2015 ;9) *Arsip* Laporan Dinamika Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat Pasca Tanwir 1 periode 2010-2015, dan ;10) *Arsip* Data Pimpinan Daerah Aisyiyah se Sumatera Barat. Selain itu juga mengumpulkan buku, artikel, skripsi, jurnal, dan dokumen. Dan penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber yang kompeten dan terlibat

langsung sebagai pengurus Pimpinan Wilayah Aisyiyah, Pengurus Pimpinan Cabang Daerah Aisyiyah dan Pimpinan Ranting Aisyiyah se Sumatera Barat diantaranya Abrilyus yang merupakan ketua pimpinan wilayah Aisyiyah Sumatera Barat tahun 2005-2010, Meliarni Rusli ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat tahun 2010-2015, Masni Bujang ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Padang tahun 2010-2015.

Tahap *kedua* adalah kritik sumber yang merupakan usaha untuk mencari keaslian data yang diperoleh melalui kritik intern dan ekstern.⁴³ Kritik Intern dilakukan untuk mencari keaslian isi sumber, sedangkan kritik ekstern dilakukan untuk mencari keabsahan keaslian sumber. Pada tahap ini penulis melakukan upaya untuk mengkaji keaslian yang ditelusuri secara mendalam mengenai gerakan dan perkembangan Aisyiyah sehingga mendapatkan keabsahan sumber yang maksimal.

Tahap *ketiga* adalah Interpretasi yang merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah dan merangkai fakta-fakta tersebut menjadi satu kesatuan. Pada tahap ini, penulis berusaha menafsirkan informasi tentang gerakan dan perkembangan serta aktivitas Aisyiyah di Sumatera Barat agar lebih relevan.

Tahap *keempat* adalah Historiografi yang merupakan fase terakhir dalam metode sejarah dengan menulis atau memaparkan hasil penelitian tentang Organisasi Aisyiyah dan Gerakan Perempuan di Sumatera Barat, 1968 - 2016.

⁴³Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 58.

1.8 Sistematika Penulisan

Berikut adalah beberapa ulasan pokok pembahasan, guna mengetahui sistematika pembahasan pada penelitian ini, diantaranya:

Bab I tersusun atas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tersusun atas awal mula masuk dan berdirinya organisasi Aisyiyah di Minangkabau, dalam hal ini akan dilihat lahirnya organisasi Aisyiyah di Yogyakarta, masuknya organisasi Aisyiyah di Minangkabau, tumbuh kembang cabang Aisyiyah sebelum kemerdekaan di Minangkabau, dan Organisasi Aisyiyah dalam kongres Muhammadiyah ke-19 tahun 1930 di Bukittinggi. Bab ini penting dibahas untuk melihat Organisasi Aisyiyah awal mula berdirinya di Minangkabau.

Bab III tersusun atas perkembangan organisasi Aisyiyah dari tahun 1968-2016, dalam hal ini akan dilihat perkembangan amal usaha Aisyiyah di Sumatera Barat baik amal usaha yang berada di bawah Pimpinan Wilayah (PWA), maupun yang berada di bawah Pimpinan Daerah (PDA) dalam bentuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan sosial, dan bidang ekonomi. Selanjutnya juga akan dilihat perkembangan struktur organisasi serta perkembangan pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting Aisyiyah di Sumatera Barat. Pembahasan bab ini untuk dapat mengetahui

perkembangan organisasi Aisyiyah dalam beberapa periode dari tahun 1968-2016.

Bab IV tersusun atas bentuk gerakan yang dilakukan oleh organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat, dalam hal ini akan dilihat beberapa poin penting diantaranya, latar belakang gerakan Organisasi Aisyiyah di Indonesia, muktamar Aisyiyah ke-39 tahun 1974 di Padang, bentuk-bentuk gerakan Organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat, kebijakan organisasi Aisyiyah, dan problematika organisasi Aisyiyah Sumatera Barat. Kehadiran Bab ini untuk memperlihatkan bentuk-bentuk gerakan Organisasi Aisyiyah di Sumatera Barat dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Bab V adalah penutup yang berisikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban keseluruhan dari pembahasan dan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, serta saran yang diharapkan penulis.

